

STRATEGI PERDAMAIAN: KONFLIK DALAM BENCANA DI ACEH

Chaidir Ali^a, Aklima^b

^aMaster of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

^bProdi Ilmu Politik, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail: chaidir.ali.psc22@mail.umy.ac.id

ABSTRAK

Konflik dan bencana alam sangat erat kaitannya; dalam beberapa kasus, bencana dapat membantu mewujudkan perdamaian di zona perang. Namun, bagaimana proses perdamaian dapat berdampak pada dinamika konflik belum dieksplorasi secara panjang lebar. Makalah ini berupaya mengkaji unsur-unsur yang mengarah pada perdamaian atau perang di zona bencana. Konflik sosial yang berkepanjangan di Aceh dari tahun 1976-2005 adalah contoh kasus dimana bencana tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 berujung pada kesepakatan damai di Aceh dalam waktu singkat. Metode dan strategi kualitatif deskriptif untuk eksplorasi literatur online digunakan dalam penelitian ini. Studi ini mengungkapkan bahwa konflik tidak ditentukan oleh bencana melainkan dipicu olehnya. Empat faktor kemiskinan, kemampuan negara, negosiasi, dan internasionalisasi perang mempengaruhi transisi dari konflik menuju perdamaian.

Kata Kunci: Strategi, Perdamaian, Konflik, Aceh

PEACE STRATEGY: CONFLICT WITHIN DISASTER IN ACEH

ABSTRACT

Conflicts and natural disasters are closely related; in some cases, disasters can help bring about peace in warring zones. However, how the peace process might impact the dynamics of the conflict hasn't been explored at great length. This paper seeks to examine the elements that lead to either peace or war in catastrophe zones. The lengthy social strife in Aceh from 1976-2005 is an example of a case where the tsunami disaster on December 26, 2004, led to a peace deal in Aceh in a short time. Descriptive qualitative methods and strategies for online literature exploration were used in the research. This study reveals that conflict is not determined by calamity but rather is sparked by it. Four factors poverty, state capability, negotiation, and internationalization of the war influence the transition from conflict to peace. These elements can promote peace but heavily rely on pre- and post-disaster peace initiatives.

Keywords: *Peace, Strategy, Conflict, Aceh*

Pasca tsunami, pemerintah Indonesia dan kelompok GAM hanya membutuhkan waktu sekitar delapan bulan untuk mencapai kesepakatan damai. Berbeda dengan konflik di Aceh. Setelah bencana tsunami, faktor-faktor yang terkait langsung dengan bencana kurang berdampak pada pemeliharaan perdamaian, menurut penelitian Gaillard et al. Namun, faktor politik dan internal yang tidak terkait dengan bencana cenderung berdampak lebih besar pada penyelesaian konflik jangka panjang (Gaillard et al., 2008). Hal ini ditunjukkan oleh proses rekonstruksi yang berjalan lambat, tidak konsisten, dan seringkali berkualitas buruk sehingga menghambat atau bahkan membahayakan proses perdamaian.

Diharapkan dengan menggunakan studi kasus konflik intra-negara di Aceh, makalah ini akan dapat menjelaskan keadaan dimana bencana mempengaruhi konflik dengan cara yang menghasilkan perdamaian, bukan sebaliknya, dimana bencana mempengaruhi konflik dengan cara yang menghasilkan eskalasi konflik yang lebih tinggi (Goodhand et al., 2005).

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif analisis dokumentasi dan dirancang dalam bentuk penelitian studi kasus, dengan menggunakan software Nvivo 12 Plus. Rancangan penelitian seperti ini berguna untuk mempelajari fenomena sosial untuk menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia dan kelompok, dari sudut pandang yang sama dengan objek yang diteliti melihat permasalahannya (Freelon et al., 2018).

Jenis penelitian ini berfokus pada makna dan pemahaman daripada kuantifikasi. Christopher Lamont menjelaskan bahwa metode kualitatif digunakan untuk memahami dunia disekitarnya karena penelitian jenis ini lebih menitikberatkan pada makna dan proses yang membentuk hubungan internasional (Saleh et al., 2019).

Data Sekunder (*Secondary data*) merupakan data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi (Syafrizal Helmi Situmorang, Muslich Lufti, 2014). sumber data penelitian ini adalah artikel dan jurnal ilmiah serta berbagai laporan resmi yang dikumpulkan melalui pencarian di internet sebagai sumber utama dalam menunjang data utama dengan masalah Strategi Perdamaian Konflik dalam Bencana Banda Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bencana dilihat dari tiga sudut. Tragedi ini, *pertama*; digambarkan sebagai pemicu perang di wilayah yang terkena dampak bencana. *Kedua*; bencana dipandang sebagai kerentanan sosial. Ketika konsekuensi sosial yang tak terhindarkan dari bencana alam tidak dikelola dengan baik, mereka mungkin dipandang sebagai kerentanan masyarakat. Kerentanan sosial adalah kata kunci bencana disini. *Ketiga*; bencana sekali lagi dapat dibagi menjadi dua kategori: bencana yang berasal dari krisis yang belum terselesaikan dan bencana yang merupakan insiden yang tidak disengaja (Hedman, 2009).

Collins melanjutkan bagian ketiga ini dengan membagi bencana menjadi dua kategori: bencana alam, atau bencana yang dihasilkan langsung oleh alam, dan bencana buatan manusia, yaitu bencana yang disebabkan oleh tindakan atau perilaku manusia. Collins melanjutkan dengan mengatakan bahwa runtuhnya budaya protektif adalah penyebab tragedi (Klitzsch, 2014). Konflik dan bencana sangat erat kaitannya, baik bencana tersebut menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi penyelesaian konflik secara damai maupun bersifat destruktif dan menyebabkannya kembali dalam skala yang

lebih besar, seperti yang terjadi pada konflik Aceh.

1. Bencana dan Konflik Aceh

Aceh merupakan wilayah yang terkena dampak tsunami dan kerusuhan sipil. Aceh menghadapi isu separatistis yang meningkat sejak tahun 1976 ketika bencana melanda. Sejak Mei 2003, ketika Aceh ditetapkan sebagai daerah darurat militer, telah terjadi militerisasi besar-besaran dengan 40.000 tentara ditempatkan disana. Pada tanggal 15 Agustus 2005, pemerintah Indonesia dan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani perjanjian damai yang mencakup pergolakan sosial di Aceh dan dampaknya terhadap skala bencana.

Setelah diskusi informal dibawah wakil Presiden Jusuf Kalla telah dimulai sebelum tsunami dan kedua belah pihak sepakat bertemu untuk pembicaraan damai, yang akan difasilitasi oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari, Pemerintah Indonesia dan GAM memulai negosiasi formal satu bulan setelah tsunami. Selain memenangkan pemerintahan sendiri atas Aceh dan pengawasan proses transisi yang dipimpin Uni Eropa, GAM meninggalkan ambisinya untuk merdeka. Pada tanggal 15 Agustus 2005, GAM dan pemerintah Indonesia secara resmi meratifikasi Memorandum of Understanding (MoU).

2. Bencana, Konflik, dan Kemiskinan

Terlepas dari kelimpahan gas Aceh dan sumber daya alam lainnya, perjuangan selama 30 tahun telah membuat penduduknya menderita, dan pada tahun 1970-an, Aceh menjadi salah satu yang termiskin di Indonesia. Tsunami mendatangkan malapetaka pada kehidupan. Pada tahun 2004, tingkat kemiskinan keseluruhan Aceh adalah 28,4%, jauh lebih tinggi dari tingkat kemiskinan umum Indonesia sebesar 16,7%. Pasca tsunami,

tingkat kemiskinan meningkat, terutama di daerah yang terkena bencana dan konflik.

Meskipun tingkat kemiskinan sedikit meningkat pada tahun 2005 dan kemudian menurun pada tahun 2006, dampak tsunami terhadap kemiskinan tidak sama di seluruh Aceh. Data kemiskinan di sekitar Banda Aceh, tempat yang terkena dampak tsunami, yang tingkatnya paling rendah, pada tahun 2006 menunjukkan penurunan angka kemiskinan diseluruh Aceh, termasuk yang terkena bencana tersebut (Hedman, 2009).

Menurut justifikasi sebelumnya, tingkat kemiskinan Aceh hanya sedikit meningkat akibat bencana tsunami. Sebaliknya, Aceh telah menderita kerugian yang signifikan akibat konflik selama 30 tahun tersebut. Menurut perkiraan Aspinall, 15.000 orang tewas selama perjuangan 30 tahun (Sinulingga et al., 2020). Aceh merupakan provinsi dengan sumber daya alam yang melimpah, namun pertumbuhan ekonominya lebih lambat dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Saat konflik Aceh mencapai fase ketiga dan terparah, yang menjadikan Aceh sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia, Aceh menjadi satu-satunya provinsi dengan tingkat kemiskinan yang terus meningkat setelah tahun 2000 (Gaillard et al., 2008).

Tabel 1. Bencana dan Konflik Aceh

Jenis Acara	Konflik GAM-RI dan Bencana Tsunami 2004
Dampak Bencana	1. 130.000 orang meninggal 2. Kerusakan dan kerugian sebesar US\$ 4,4 Miliar 3. Mempengaruhi 97% Produk Domestik Bruto provinsi atau 2% Produk Domestik Bruto nasional
Dampak Konflik	15.000 orang tewas akibat konflik tersebut
Masalah Konflik	Separatisme (otonomi dan penentuan nasib sendiri)
Dinamika Konflik	Perdamaian

Sumber: NVivo 12Plus; Penelitian dari berbagai sumber jurnal.

Sumber daya alam dapat membuat kekerasan lebih mungkin terjadi di zona bencana, menurut Theisen. Dengan terlibat dalam monopoli dan penguasaan sumber

daya alam, kelompok pemberontak dapat membeli persenjataan dan mengembangkan strategi jangka panjang untuk memajukan kepentingan mereka dalam pertempuran yang sedang berlangsung. Selain itu, kondisi konflik dianggap cenderung memburuk dalam keadaan seperti ini.

Akibat kondisi pascabencana, pembiayaan untuk konflik dan perang sangat terbatas, sehingga jika jumlah sumber daya alam yang dikuasai wilayah konflik sedikit, maka konflik cenderung menurun (Theisen & Holtermann, 2010). Slettebak menambahkan, konflik tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan. Selain itu, perselisihan sosial dimasyarakat muncul sebagai akibat dari kemiskinan. Kemiskinan lebih banyak terjadi di zona konflik. Hal ini disebabkan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok. Kemungkinan perang akan meningkat mengingat keadaan ini dan bencana alam yang akan datang (Slettebak, 2012).

Perang Aceh memberikan wawasan bagaimana kemiskinan dan bencana alam mereduksi kekuatan pemerintah dan faksi-faksi pemberontak. Salah satu lokasi yang mengalami kerusakan tinggi akibat tragedi itu, terutama di daerah-daerah yang dikuasai pasukan pemberontak. Hal ini diperparah dengan persoalan ekonomi daerah akibat konflik yang berlarut-larut sebelum bencana. Akibat masalah ekonomi tersebut, organisasi pemberontak kesulitan mendanai kegiatan konflik.

Isu bencana dalam situasi ini telah mereduksi wibawa peserta konflik, dalam contoh ini di pihak kelompok pemberontak, sedangkan pengaruh peserta pemerintah cenderung lebih solid dan didukung oleh bantuan internasional yang datang secara masif. Penyakit ini sangat nyata, terutama di Aceh. Bagi prajurit GAM yang terdemoralisasi oleh Daerah Operasi Militer (DOM), bencana tsunami memberikan motivasi yang mereka butuhkan untuk

mengejar perdamaian. Pembeneran ini sesuai dengan teori Kelman bahwa bencana dapat mengakibatkan gencatan senjata sementara antara faksi-faksi yang berseberangan karena perlunya bantuan kemanusiaan, rusaknya infrastruktur, dan tewasnya personel militer.

Namun, proses perdamaian jangka panjang belum berhasil dalam kondisi ini. Bagi prajurit GAM yang terdemoralisasi oleh Daerah Operasi Militer (DOM), bencana tsunami memberikan motivasi yang mereka butuhkan untuk mengejar perdamaian. Pembeneran ini sesuai dengan teori Kelman bahwa bencana dapat mengakibatkan gencatan senjata sementara antara faksi-faksi yang berseberangan karena kebutuhan akan bantuan kemanusiaan, rusaknya infrastruktur, dan kematian personel militer.

Sayangnya, proses perdamaian jangka panjang belum berhasil dalam keadaan ini, bencana tsunami memberi mereka motivasi yang mereka butuhkan untuk mengejar perdamaian. Pembeneran ini sesuai dengan teori Kelman bahwa bencana dapat mengakibatkan gencatan senjata sementara antara faksi-faksi yang berseberangan karena perlunya bantuan kemanusiaan, rusaknya infrastruktur, dan tewasnya personel militer (Ohlson, 2008). Namun, proses perdamaian jangka panjang belum berhasil dalam keadaan ini (Kelman, 2016).

3. Kapasitas Negara dalam Mengelola Konflik dan Bencana

Daerah rawan bencana, membutuhkan keterlibatan negara dalam pembuatan peraturan penanggulangan bencana sangat diperlukan. Ketika negara dapat mengelola bencana, akan ada kedamaian. Konflik akan semakin parah dan jalan menuju perdamaian akan terhambat, sebaliknya jika pemerintah cenderung lamban dan mengambil tindakan dan kebijakan yang buruk (Slettebak, 2012).

Proses perdamaian pascatsunami di Indonesia dan Aceh diperkirakan lebih memberikan dampak yang menguntungkan

jika kita menelaah kemampuan pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan etnis. Susilo Bambang Yudhoyono adalah pemimpin pemerintahan baru Indonesia pada saat itu, dia jauh lebih kuat dan terkoordinasi dengan baik dalam usahanya menjaga perdamaian di Aceh. Pemerintahan SBY-Kalla mengontrol lembaga-lembaga kunci yang diperlukan untuk memastikan pengesahan UU Pemerintahan Aceh (Hedman, 2009).

Topik negara "predator" atau neoliberal dan bagaimana mereka dapat menggunakan bencana untuk keuntungan politik jarang diangkat dalam diskusi tentang dampak dan tanggapan negara terhadap bencana (Brancati, 2007). Bencana sering disebut secara politis sebagai katalisator, jendela peluang, atau momen penting untuk transformasi sosial di suatu negara. Kontrak sosial antara warga negara dan negara diubah oleh keadaan kritis seperti bencana, memaksa kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kembali aliansi mereka. Bencana seringkali menonjolkan kebaikan yang melekat pada fungsi negara daripada mengakui bahwa negara merupakan ancaman bagi sebagian besar komunitas rentan yang sudah hidup dalam kerentanan.

4. Proses Negosiasi Damai

Menurut Kelman, upaya para pemain untuk mencapai kompromi sebelum serangan bencana berdampak pada kemungkinan perdamaian (Kelman, 2016). Setiap pihak yang bernegosiasi harus membangun dan memiliki unsur kepercayaan sebelum memutuskan bagaimana menyelesaikan konflik (Brooks et al., 2016) Tentu saja, sifat dan sikap pihak lawan juga berdampak pada bagaimana proses negosiasi berlangsung. Daerah konflik yang sudah memulai tahap negosiasi damai antara pihak-pihak yang berkonflik biasanya lebih cepat membentuk perdamaian daripada daerah konflik yang belum.

Proses perdamaian Aceh tidak terlepas dari peran internasional di dalamnya. Padahal, perundingan antara GAM dan Republik Indonesia sudah berlangsung sebelum tsunami. Mengingat pentingnya posisi Indonesia pasca-insiden dikomunitas internasional sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, komunitas internasional berdedikasi untuk menawarkan dukungan finansial dan politik untuk penanggulangan bencana Aceh. Mayoritas korban tsunami di Aceh tinggal di tempat yang berbahaya.

Komunitas internasional bekerja untuk mengakhiri kekerasan dan perang di wilayah tertentu karena sulit untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan di sana. Inisiatif Manajemen Krisis, Organisasi Perdamaian Finlandia yang didirikan oleh Martti Ahtisaari dan dilengkapi dengan Misi Pemantauan Aceh, memfasilitasi diskusi perdamaian dengan bantuan negara-negara ASEAN, Uni Eropa, dan diplomat internasional (Siddiqi, 2018). Nota Kesepahaman (MOU) Helsinki dan proses perdamaian Aceh, yang berlaku enam bulan setelah bencana tsunami, sama-sama dipicu oleh bantuan asing yang mengalir ke Aceh.

Susilo Bambang Yudhoyono, pemimpin pemerintahan Indonesia yang baru terpilih, telah melakukan kontak awal dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebelum tragedi itu melalui perantara Finlandia. Salah satu kesepakatan perdamaian internasional paling sukses di dunia adalah proses perdamaian Aceh, yang ditengahi oleh Finlandia. Susilo Bambang Yudhoyono, pemimpin pemerintahan Indonesia yang baru terpilih, telah melakukan kontak awal dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebelum tragedi itu melalui perantara Finlandia. Dampak Jangka Panjang.

Salah satu kesepakatan perdamaian internasional paling sukses di dunia adalah proses perdamaian Aceh, yang ditengahi oleh Finlandia. Susilo Bambang Yudhoyono,

pemimpin pemerintahan Indonesia yang baru terpilih, telah melakukan kontak awal dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebelum tragedi itu melalui perantara Finlandia. Salah satu kesepakatan perdamaian internasional paling sukses di dunia adalah proses perdamaian Aceh, yang ditengahi oleh Finlandia (Le Billon & Waizenegger, 2007).

Tidak diragukan lagi, ciri-ciri kelompok pemberontak berdampak signifikan pada proses tawar-menawar. GAM adalah organisasi yang lebih mudah beradaptasi untuk memulai proses perdamaian, memiliki struktur organisasi yang lebih longgar, dan menawarkan peluang untuk regenerasi kepemimpinan meskipun menghadapi perpecahan selama proses perdamaian. Pejuang GAM diizinkan masuk dan keluar organisasi dengan cukup mudah. Beberapa anggota GAM bekerja sebagai petani disiang hari dan sebagai prajurit dimalam hari. Kelompok ini juga memelihara hubungan sosial dan ikatan dengan komunitas lokal. GAM lebih merupakan gerakan sosial sebagai akibat dari keadaan.

Negosiasi sudah dimulai dalam proses perdamaian Aceh sebelum tragedi, tetapi ketika perselisihan GAM-RI diselesaikan secara damai, hasilnya berbeda secara substansial. Dalam hal ini, sikap kelompok pemberontak dan pengaruhnya terhadap sifat organisasi relevan dengan proses perdamaian. Beberapa aspek GAM dapat berubah selama proses perdamaian. Ciri-ciri teroris dan pejuang pembebasan dibedakan oleh Michel Wieviorka. Menurut Wieviorka, sebuah organisasi teroris kadang-kadang kehilangan hubungannya dengan penyebab awalnya, apakah itu kepentingan etnis, nasional, atau komunitas lokal dan tumbuh menjadi jaringan teror transnasional atau mesin perang dengan jaringan di seluruh dunia (Wieviorka, 2000).

Sepanjang transisi menuju perdamaian dan demokrasi, kelompok-kelompok seperti itu pasti akan pecah. Sepanjang proses

perdamaian, GAM mengalami proses fragmentasi. Mantan militan GAM dan partai lainnya telah membentuk Komite Peralihan Aceh, juga dikenal sebagai Komite Peralihan Aceh (KPA). Perselisihan muncul antara kelompok eks-GAM dan paramiliter yang didukung oleh TNI, khususnya di Aceh Tengah, di mana kekuasaan GAM dibatasi oleh keinginan kelompok etnis lain untuk merdeka dari Aceh.

5. Internasionalisasi Konflik

Dalam berbagai literatur, cukup banyak yang meyakini bahwa bantuan internasional dalam konflik bersenjata internal dapat meningkatkan proses perdamaian atau menjadi bagian dari siklus konflik baru. Hal ini didukung oleh penelitian dari United States Institute for Peace yang menemukan bahwa dari 38 proses perdamaian yang terjadi dengan bantuan negara lain dalam dekade 1989-1999, 33 diantaranya kembali berperang dalam tiga tahun pertama (Frank & Martínez I Coma, 2017). Dalam situasi seperti pascatsunami di Aceh, ada tiga aktor kunci yang berperan besar dalam menyeimbangkan konflik dan perdamaian. Dalam situasi ini, negara dan kelompok yang menentanginya, serta komunitas kemanusiaan internasional, biasanya menjadi dua pihak utama dalam konflik tersebut. Sebagai aktor keempat, masyarakat sipil seringkali tidak dilibatkan dalam upaya perdamaian.

Tingginya tingkat keterlibatan komunitas internasional baik dalam proses perdamaian tercermin dari dana yang tersedia maupun jumlah lembaga dan staf internasional yang hadir di daerah konflik dan bencana. Sebelum bencana tsunami, konflik Aceh telah menjadi “perang diam”, terisolasi dari dunia internasional karena keengganan pemerintah Indonesia untuk menginternasionalkan konflik tersebut, terutama setelah Timor-Leste merdeka dari Indonesia (Malik, 2017). Di sisi lain, pemerintah Indonesia memiliki peraturan

keras yang melarang LSM asing beroperasi di Aceh atau daerah bermasalah lainnya. Yusuf Kalla, wakil presiden Indonesia, tidak meminta bantuan internasional untuk Aceh sampai ia mengunjungi provinsi tersebut pada 27 Desember 2004, setelah bencana tsunami, dan melihat kehancuran disana. Aceh sengaja dijauhkan dari konflik selama bertahun-tahun.

Aceh Monitoring Mission (AMM) didirikan di Aceh dengan garis waktu dan misi yang tepat. Uni Eropa dan pengamat dari ASEAN membentuk AMM. Organisasi independen harus menangani pelanggaran gencatan senjata, dan proses perdamaian dibantu oleh fakta bahwa pengamat UE dan ASEAN lebih tidak memihak di Aceh. Tidak banyak internasionalisasi dalam proses perdamaian Aceh. Proses perdamaian lebih baik dimiliki secara lokal di Aceh, termasuk oleh organisasi masyarakat sipil (Klitzsch, 2014).

Selain itu, keterlibatan internasional menimbulkan biaya transaksi yang sangat besar pada proses perdamaian itu sendiri sehingga kepemilikan lokal dan partisipasi masyarakat sipil dalam proses perdamaian sangat terbatas. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap efektivitas pembangunan perdamaian di Indonesia adalah keterpisahan dan keterkaitan antara reintegrasi pasca konflik dan rekonstruksi prakarsa pemulihan pasca tsunami. Hal ini menunjukkan bahwa terlepas dari adanya sistem kerjasama internasional, entitas internasional tetap dapat memainkan peran yang saling bertentangan dalam skenario pasca konflik.

KESIMPULAN

Bencana tsunami memungkinkan mereka yang terlibat dalam konflik untuk bergerak menuju perdamaian. Dalam kasus Aceh, terlihat jelas bahwa kecenderungan politik pasca-bencana memainkan peran penting dalam menentukan penyelesaian

konflik, meskipun keadaan pra-bencana juga berpengaruh. Menurunnya kekuatan kelompok GAM sebagai akibat dampak tsunami yang semakin parah terhadap kemiskinan, kemampuan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan melakukan pemulihan pasca-bencana, proses negosiasi yang berlangsung bahkan sebelum bencana, dan keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak menginternasionalkan konflik merupakan faktor-faktor yang turut mendukung terciptanya perdamaian di Aceh. Selain itu, keterlibatan negara dan komunitas internasional dalam pengelolaan bencana dan penyelesaian konflik memiliki dampak yang signifikan. Konflik dan bencana saling mempengaruhi, serta penanganan yang baik terhadap bencana dan konflik menjadi penting dalam mencapai perdamaian kemudian pemulihan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brancati, D. (2007). *Political aftershocks: The impact of earthquakes on intrastate conflict*. *Journal of Conflict Resolution*, 51(5), 715–743. <https://doi.org/10.1177/0022002707305234>
- Brooks, S. G., Wohlforth, W. C., Culora, T., Dafoe, A., Erickson, A., Fravel, T., Gholz, E., Goldstein, L., Holmes, J., Liff, A., Lindsay, J., Long, A., Macekura, S., Mattis, J., Montgomery, E., Murray, W., Poddar, K., Press, D., Shapiro, J., ... Wu, R. (2016). *The Rise and Fall of the Great Powers in the Twenty-first Century*. 24(1), 7–53. <https://doi.org/10.1162/ISEC>
- Frank, R. W., & Martínez i Coma, F. (2017). *How election dynamics shape perceptions of electoral integrity*. *Electoral Studies*, 48, 153–165. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2017.05.007>
- Freelon, D., McIlwain, C., & Clark, M. (2018). *Quantifying the power and consequences of social media protest*. *New Media and Society*, 20(3), 990–1011.

- <https://doi.org/10.1177/1461444816676646>.
- Gaillard, J. C., Clavé, E., & Kelman, I. (2008). *Wave of peace? Tsunami disaster diplomacy in Aceh, Indonesia*. *Geoforum*, 39(1), 511–526. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2007.10.010>.
- Goodhand, B. J., Klem, B., Fonseka, D., Keethaponcalan, S. I., & Sardesai, S. (2005). *Aid, Conflict and Peacebuilding in Sri Lanka, 2000 – 2005*. *Tracks A Journal Of Artists Writings, 2000–2005*.
- Hedman, E. L. E. (2009). *Deconstructing reconstruction in post-tsunami Aceh: Governmentality, displacement and politics*. *Oxford Development Studies*, 37(1), 63–76. <https://doi.org/10.1080/13600810802695964>
- Kelman, I. (2016). *Catastrophe and Conflict: Disaster Diplomacy and Its Foreign Policy Implications*. *Brill Research Perspectives in Diplomacy and Foreign Policy*, 1(1), 1–76. <https://doi.org/10.1163/24056006-12340001>
- Klitzsch, N. (2014). *Disaster politics or disaster of politics? Post-tsunami conflict transformation in Sri Lanka and Aceh, Indonesia*. *Cooperation and Conflict*, 49(4), 554–573. <https://doi.org/10.1177/0010836714545692>
- Le Billon, P., & Waizenegger, A. (2007). *Peace in the wake of disaster? Secessionist conflicts and the 2004 Indian Ocean tsunami*. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 32(3), 411–427. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2007.00257.x>.
- Malik, S. I. (2017). *Identity, citizenship and 'home' through the transnational perspective(S) of second generation Sudanese migrants in Qatar*. *Diaspora Studies*, 10(2), 175–192. <https://doi.org/10.1080/09739572.2017.1324384>
- Ohlson, T. (2008). *Understanding causes of war and peace*. *European Journal of International Relations*, 14(1), 133–160. <https://doi.org/10.1177/1354066107087765>
- Saleh, S., Pd, S., Pd, M., Helaluddin, D., كوكورس, كريسيتينا, Raco, J., Salim & Syahrums, Ahyar, H. dkk, & Helaluddin, D. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif.pdf* (Issue March, pp. 11–11).
- Schwartz, D. M., Deligiannis, T., & Homer-dixon, T. F. (2000). *The environment and violent conflict: a response to Gleditsch's critique and some suggestions for future research*. *Environmental Change and Security Project Report*, 6, 77–94.
- Siddiqi, A. (2018). *Disasters in conflict areas: finding the politics*. *Disasters*, 42, S161–S172. <https://doi.org/10.1111/disa.12302>.
- Sinulingga, A. A., Halim, A., & Nasir, P. E. (2020). *Bencana dan Konflik: Pelajaran dari Aceh dan Sri Lanka*. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 9(2), 203. <https://doi.org/10.25077/ajis.9.1.203-217.2020>
- Slettebak, R. T. (2012). *Don't blame the weather! climate-related natural disasters and civil conflict*. *Journal of Peace Research*, 49(1), 163–176. <https://doi.org/10.1177/0022343311425693>
- Theisen, O. M., & Holtermann, H. (2010). *Climate wars*. *Economist*, 396(8690), 79–106. <https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199933877.003.0005>
- Uyangoda, J. (2005). *Ethnic conflict, the state and the Tsunami disaster in Sri Lanka*. *Inter-Asia Cultural Studies*, 6(3), 341–352. <https://doi.org/10.1080/14649370500169979>.
- Wieviorka, M. (2000). *Contextualizing french multiculturalism and racism*. *Theory, Culture and Society*, 17(1), 157–162. <https://doi.org/10.1177/02632760022050942>

Situmorang. Helmi. Fahrizal, Lufti. Muslich.
2014. Analisis Data Untuk Riset
Manajemen dan Bisnis (3).